



Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara)

Muhammad Yafizham

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: muhammadyafizham12@gmail.com

Aqwa Naser Daulay

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: aqwanaserdaulay@uinsu.ac.id

Alamat: Jl. IAIN No. 1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Abstract. *Accountability and transparency, which are the embodiment of good governance practices (good governance/GG) in the financial management of central and regional governments as public sector organizations, are important goals of public sector accounting and administration reform. This research aims to determine the role of accounting in realizing good governance. This type of research is qualitative research, which is carried out using two types of data, namely primary data and secondary data. The results of the research show that the role of accounting in realizing accountability in the North Sumatra Social Service is very important, and overall the North Sumatra Social Service has implemented the principles of good governance in public sector organizations by involving accounting in it. The principles of accountability, responsibility, transparency, efficiency and effectiveness, as well as the strategic vision and mission of the North Sumatra Social Service can be realized with the role of accounting, because accounting is very important and sustainable in presenting, reporting and being accountable for public sector performance reports in accordance with the principles of financial reporting accrual basis based on applicable regulations.*

Keywords: *Role of Accounting, Good Governance, Social Service*

Abstrak. Akuntabilitas dan transparansi yang merupakan perwujudan praktik tata kelola yang baik (*good governance/GG*) dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah sebagai organisasi sektor publik merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas pada Dinas Sosial Sumatera Utara sangatlah penting, dan secara keseluruhan Dinas Sosial Sumatera Utara telah menerapkan prinsip *good governance* dalam organisasi sektor publik dengan melibatkan akuntansi didalamnya. Prinsip akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, efisiensi dan efektivitas, serta visi dan misi yang strategis pada Dinas Sosial Sumatera Utara dapat diwujudkan dengan adanya peran akuntansi, karena akuntansi sangat penting dan berkesinambungan dalam menyajikan, melaporkan dan bertanggungjawabkan laporan kinerja sektor publik sesuai dengan prinsip laporan keuangan akrual basis berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Peran Akuntansi, *Good Governance*, Dinas Sosial

LATAR BELAKANG

Di era reformasi saat ini, birokrasi Indonesia belum berkembang dengan baik karena masih banyak lembaga publik yang percaya bahwa rakyat lah yang membutuhkannya. Asumsi ini juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut, sehingga kinerja organisasi sektor publik yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku juga negatif bagi masyarakat umum. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik yang hilang terhadap kinerja organisasi sektor publik dan melayani masyarakat dengan mendorong organisasi sektor publik untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* atau tata kelola yang baik agar dapat mengmbalikan rasa percaya masyarakat kepada organisasi publik dan dapat meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat (Susilawati, 2017).

Good governance pada dasarnya adalah sebuah konsep sebagai suatu metode atau pola yang dapat terwujud jika terdapat tiga pilar pendukung yang berfungsi dengan baik yaitu negara, sektor swasta dan masyarakat madani dalam suatu negara (Rustiarini, 2016). Konsep pemerintahan yang baik adalah pemerintah dengan otoritas negara, di mana ada banyak prinsip yang mendukung implementasi organisasi yang tepat. *Good governance* berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, mencakup banyak pedoman yang terdiri dari tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, kepastian hukum, proposionalitas, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, efesiensi, efektivitas, dan keadilan. Dalam hal tata kelola yang baik, ada beberapa prinsip yang dapat diimplementasikan dengan baik melalui peran akuntansi.

Akuntansi sangatlah penting, dalam hal ini akuntansi adalah sistem informasi yang membantu memenuhi tugas organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam organisasi sektor publik, peran akuntansi dalam mencapai *good governance* sangat penting untuk mendukung terciptanya akuntabilitas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, dan visi strategis. Akuntansi saat ini bukan hanya instrumen untuk merekam peristiwa ekonomi, tetapi merupakan tujuan dalam setiap proses. Di setiap unit ekonomi, sektor publik dan akuntansi swasta berkontribusi pada pemrosesan sumber daya dalam unit. Kontribusi akuntansi perusahaan meliputi penciptaan kontrol internal, pengujian akuntabilitas, dan penyediaan informasi yang andal dan transparan. Untuk setiap perusahaan yang membutuhkan proses akuntansi, tujuan perusahaan dapat dihitung dan dicapai dengan benar.

Pada perkembangan saat ini, peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* difokuskan untuk menciptakan sistem birokrasi yang handal dan transparan, khususnya bagi pembuatan laporan keuangan yang didalamnya terdapat banyak informasi penting untuk pertimbangan pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan sebagai tolak ukur kinerja. Akuntansi berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan organisasi sektor publik yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, standar yang digunakan yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan tersebut adalah landasan utama dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dari organisasi sektor publik tersebut, jika laporan keuangan yang disusun oleh organisasi sektor publik tersebut dapat diandalkan dan transparan maka dapat membantu para *stakeholder* dan pemangku kepentingan dalam menyuarakan pendapat untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi organisasi sektor publik tersebut. Dengan demikian perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dibuat oleh organisasi sektor publik tersebut akan lebih efektif dan efisiensi.

Dinas Sosial Sumatera Utara adalah salah satu organisasi sektor publik dari lembaga pemerintahan negara. Dalam hal ini dinas sosial menjadi wadah bagi relawan sosial dan pekerja sosial serta peyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial. Sebagai organisasi sektor publik, dinas sosial dapat melayani segala bentuk kebutuhan dan hak publik. Tujuan organisasi sektor publik bersifat nonprofit artinya bahwa pelayanan kepada publik adalah hal paling utama yang harus diutamakan dan dilaksanakan. Organisasi ini memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan parlemen serta anggaran yang dimiliki bersifat terbuka untuk publik karena sumber dana tersebut berasal dari masyarakat yang nantinya kembali lagi ke masyarakat. Tata pemerintahan yang baik memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja masyarakat. Dinas Sosial Sumatera Utara juga harus memberikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku laporan keuangan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan, dapat diandalkan dan transparan sehingga perumusan kebijakan dan keputusan Dinas Sosial Sumatera Utara dapat digunakan sebagai referensi bagi para pemangku kepentingan untuk mengekspresikan aspirasinya. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik adalah untuk mendukung penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, sehingga informasi tentang laporan keuangan Dinas Sosial Sumatera Utara dapat dipertimbangkan dan transparan bagi

perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Akuntansi juga berperan dalam menyediakan perhitungan untuk mencapai kegiatan yang diprogramkan untuk menyelesaikan kegiatan yang direncanakan dan berfungsi dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan prinsip tata kelola yang baik atau *Good Governance* dengan memunculkan akuntansi didalamnya, guna dapat meminimalisir dan mempersiapkan terjadinya penyelewengan dana dan dapat meningkatkan kinerja akuntansi serta pertanggungjawaban setiap kegiatan dengan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah. Maka dari itu pemerintah daerah harus menyadari bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik dan masyarakat berhak mengetahuinya. Disimpulkan dari latar belakang tersebut bahwa *good governance* dapat terwujud apabila prinsip-prinsip *good governance* dapat terlaksanakan dengan baik. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* pada Dinas Sosial Sumatera Utara?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* pada Dinas Sosial Sumatera Utara.

KAJIAN TEORITIS

Akuntansi

Akuntansi secara umum adalah sebuah proses mencatat, mengklasifikasi, mengolah data, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna akuntansi seperti manajer, akuntan, auditor, dan pihak yang berkepentingan. Biasanya digunakan untuk mengambil sebuah keputusan, sebagai landasan untuk menyusun anggaran, dan membantu dalam hal membuat suatu kebijakan. Berdasarkan ASOBAT atau *A Statement of Basic Accounting Theory* dalam (Harahap, 2015), Akuntansi merupakan proses mengukur, mengidentifikasi, serta mengkomunikasikan informasi ekonomi sebagai bahan informatif dengan tujuan memungkinkan pengguna untuk mempertimbangkan berbagai alternatif ketika menarik kesimpulan. Menurut (Tebae *et al.*, 2016) Akuntansi adalah sistem akuntansi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.

Sistem Akuntansi

Menurut (Mulyadi, 2016), sistem akuntansi adalah bentuk catatan dan laporan yang disusun untuk memberikan informasi keuangan yang harus dikelola oleh manajemen. Tujuan sistem akuntansi adalah menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan bisnis baru, meningkatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang ada dalam hal kualitas, ketepatan penyajian atau struktur informasi untuk meningkatkan pengendalian akuntansi dan pengendalian akuntansi internal, yaitu untuk meningkatkan keandalan dan kinerja, memberikan informasi tentang kewajiban dan melindungi aset perusahaan dan mengurangi biaya administrasi (Mulyadi, 2013). Selain tujuan yang telah ditetapkan, sistem akuntansi memiliki keunggulan dalam menyampaikan informasi yang benar dan akurat, sehingga perusahaan dapat melakukan aktivitas *value chain* secara efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya. Produksi produk yang dihasilkan dapat meningkatkan efisiensi kinerja bisnis, baik di departemen keuangan maupun departemen lainnya, meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan, dan meningkatkan peran berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*).

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari sebuah proses akuntansi yang dijadikan informasi bagi para pengguna untuk membuat suatu kebijakan, pengambilan keputusan dan sebagai pertanggungjawaban dari entitas tersebut dalam menggunakan sumber daya. Menurut (Hariadi *et al.*, 2010), laporan keuangan berisi informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Entitas pelaporan wajib untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil pelaksanaan kegiatan yang sistematis dan terstruktur selama pelaporan untuk memastikan akuntabilitas, pengelolaan, transparansi, keseimbangan antar generasi dan penilaian kinerja. Laporan keuangan dapat mengungkap dan menginformasikan empat kegiatan perusahaan, yaitu perencanaan, pembiayaan, investasi dan operasional (Sadeli, 2015).

Good Governance

Good governance merupakan tata pelaksanaan yang baik, secara sederhana *good governance* adalah suatu perangkat yang digunakan entitas swasta ataupun negeri yang ditujukan untuk pengambilan keputusan. Terdapat tiga pilar elemen dasar yang terkait dengan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (Osborne and Gaebler, 1992) yaitu

adalah: (1) Transparansi adalah keterbukaan tata kelola pemerintahan, lingkungan, ekonomi dan sosial, (2) Partisipasi adalah penerapan keputusan demokratis dan pengakuan hak asasi manusia, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, (3) Tanggung jawab adalah kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas dan bila belum ada atau tidak puas dapat kena sanksi.

Prinsip Good Governance

Menurut UNDP karakteristik pelaksanaan *good governance* meliputi: 1) *Participation*. Partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan suaranya. Partisipasi tersebut didasarkan pada kebebasan berserikat dan berekspresi serta partisipasi konstruktif (2) *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang (3) *Transparency*. Transparansi didasarkan pada kebebasan memperoleh informasi. Informasi kepentingan umum dapat diperoleh langsung dari pihak yang membutuhkan (4) *Responsiveness*. Instansi pemerintah harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholders* (5) *Consensus of orientation*. Berpusat pada kepentingan masyarakat yang lebih luas (6) *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan (7) *Efficiency and effectiveness*. Pengelolaan dana publik efisien dan efektif (8) *Accountability*. Tanggung jawab kepada publik untuk setiap aktivitas yang dilakukan (9) *Strategic vision*. Pejabat pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jangka panjang (Mardiasmo, 2004).

Organisasi Sektor Publik

Organisasi secara umum memiliki arti sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama untuk menggapai suatu tujuan. Menurut (Mahsun, 2009) Organisasi sektor publik berhubungan langsung dengan penyediaan *services and goods* untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Menurut (Mahsun *et al.*, 2007) berbagai organisasi terwakili dalam sektor publik di Indonesia termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, berbagai perusahaan dimana pemerintah memiliki saham (BUMN dan BUMN) organisasi pendidikan, organisasi kesehatan dan organisasi masyarakat/massa. Kerangka organisasi Organisasi harus menyediakan kerangka kerja manajemen sebagai pedoman untuk kegiatan atau proyek dan sebagai dasar untuk keputusan organisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendalami suatu kejadian atau fenomena yang terjadi dan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan atas data, informasi dan fakta yang didapat dilapangan saat melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mendalami bagaimana peran akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, efisiensi dan efektivitas, dan visi yang strategis. Adapun sebagai objek penelitian adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang beralamatkan di Jl. Sampul No. 138, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dimana data primer diperoleh secara langsung saat di lapangan dan sesuai dengan keadaan saat melakukan penelitian dan data tersebut diambil dengan menggunakan teknik wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan dan data tersebut diambil dengan menggunakan teknik dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah dengan mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab organisasi sektor publik untuk semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam rencana kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Suatu organisasi publik telah berhasil menerapkan prinsip akuntabilitas apabila dapat melaksanakan dengan benar seluruh kegiatan yang terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah maupun masyarakat (Napisah, 2015). Peran akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas pada organisasi sektor publik sangatlah penting, karena dengan adanya akuntansi organisasi sektor publik lebih mudah dalam menjalankan tugas atau wewenang yang telah ditetapkan agar dapat terlaksana sesuai dengan target dan sasaran. Akuntansi dapat membantu organisasi sektor publik untuk mempertanggungjawabkan tugas dan wewenangnya dengan cara melakukan pengawasan

atas semua kegiatan yang akan dikerjakan dan memberikan gambaran atau rancangan agar kegiatan tersebut sesuai target dan sasaran. Dinas Sosial Sumatera Utara mengimplementasikan prinsip akuntabilitas sudah baik. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari salah satu karyawan yaitu Bapak Nasrin di bidang Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Sumatera Utara yang menyatakan:

“Untuk model laporan yang diterapkan disini adalah basis akrual karena mengacu kepada praktik manajemen keuangan modern di sektor publik. Tujuan basis akrual itu sendiri adalah mendukung terciptanya akuntabilitas publik yaitu menyajikan, melaporkan, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan laporan Dinas Sosial Sumatera Utara. Prinsip yang digunakan adalah akrual basis karena pada dasarnya pencatatan, pengakuan dan penyajian yang kita lakukan pada saat terjadi transaksi tersebut. Dalam hal ini akuntansi sangat membantu kita untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam organisasi kita karena sistem akuntansi dapat memudahkan kita dalam menjalankan tugasnya. Akuntabilitas juga sangat didukung dengan adanya akuntansi. Sehingga menurut saya peran akuntansi sangat penting untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas”.

Dengan demikian, organisasi sektor publik dalam mewujudkan akuntabilitas tidak luput dari peranan akuntansi didalamnya. Akuntansi dapat membantu organisasi sektor publik dalam mempertanggungjawabkan semua tugas dan wewenang yang dilaksanakan telah sesuai dengan target dan sasaran yang dituju. Jika target dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terlaksana maka prinsip akuntabilitas dapat terwujud dengan baik.

Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Transparansi

Prinsip transparansi adalah keterbukaan informasi yang diciptakan oleh organisasi sektor publik, dimana informasi tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan dan kredibel oleh informan. Konsep transparansi itu sendiri tidak telanjang, tetapi berarti adanya suatu sistem yang memungkinkan adanya keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan tentang isu-isu yang terjadi di dalam suatu organisasi (Risha Novia, 2021). Peran akuntansi dalam mewujudkan transparansi pada organisasi sektor publik menjadi hal yang penting, karena dengan adanya akuntansi organisasi sektor publik dimudahkan dalam menyusun laporan atas kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Informasi tersebut banyak

digunakan oleh pemegang kepentingan untuk acuan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan agar kinerja organisasi menjadi lebih baik. Informasi yang disebarkan bukan hanya tentang laporan atas kegiatan tetapi juga adanya keterbukaan informasi atas kejelasan pelaksanaan program kegiatan guna mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Prinsip ini telah diterapkan oleh Dinas Sosial Sumatera Utara, artinya memiliki akses data yang mudah dan terbuka terhadap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, contoh informasi yang berkaitan dengan laporan kegiatan adalah Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Hal tersebut didukung akan hasil wawancara menurut pendapat Bapak Nasrin di bidang Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Sumatera Utara yang menyatakan bahwa:

“Akuntansi berperan untuk menyebarluaskan informasi yang telah dibuat oleh Dinas Sosial dan sudah transparan pastinya, karena program yang kita lakukan sudah banyak masyarakat yang mengetahuinya. Transparansi menurut saya penting maka dari itu peran akuntansi sangatlah berperan dalam mewujudkan transparansi itu sendiri karena di dalam laporan itu kita bisa mengetahui kegiatan apa saja yang dijalankan selama setahun penuh dan dana yang telah digunakan digunakan untuk apa saja”.

Peran akuntansi dalam mewujudkan transparansi pada organisasi sektor publik sangatlah penting, karena informasi yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik harus akurat dan mempunyai reabilitas yang tinggi agar pemegang kepentingan yang menggunakan informasi tersebut untuk merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik. Keakuratan dan reabilitas informasi dapat dijamin dengan peranan akuntansi. Dengan demikian, untuk mewujudkan transparansi dalam organisasi sektor publik sangat bergantung pada peranan akuntansi. Akuntansi sangat berperan untuk menjamin keakuratan dan keandalan informasi yang dibuat oleh organisasi sektor publik agar laporan tersebut dapat disebar luaskan kepada pihak pemegang kepentingan untuk memudahkan pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Informasi yang akurat dan handal juga dapat membantu mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Responsibilitas

Prinsip responsibilitas berhubungan dengan tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat atau warga negara, prinsip ini juga berkaitan dengan kewajiban untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Prinsip responsibilitas berkaitan erat dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat ataupun daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan ini terdiri atas laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini menuntut kemampuan manajemen pemerintahan daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisiensi dan efektif.

Peran akuntansi dalam mewujudkan responsibilitas adalah akuntansi berperan membantu mempertanggungjawabkan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Akuntansi dapat membantu agar nilai output yang dikeluarkan sesuai untuk menjalankan suatu program kegiatan agar terlaksana dengan baik, akuntansi juga berperan untuk mempertanggungjawabkan pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut agar mempunyai nilai yang ekonomis. Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Nasrin di bidang Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Sumatera Utara yaitu sebagai berikut:

“Untuk responsibilitas yang dilakukan Dinas Sosial sendiri itu pasti bertanggungjawab karena akuntansi sendiri adalah pelaporan berdasarkan bukti-bukti pelaksanaan di lapangan. Dan sudah menggunakan sistem, jadi laporannya tinggal input saja. Dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dianggarkan harus dipertanggungjawabkan dengan hasil kinerja yang sesuai dengan target dan sasaran. Disini akuntansi sangat berperan dalam pengelolaan dana APBD tersebut, dengan akuntansi kita bisa menentukan nilai input dan output yang harus dikeluarkan dan didapatkan agar program kerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, karena dana APBD berasal dari pajak masyarakat maka dari itu kita harus bertanggungjawab kepada masyarakat dengan hasil kinerja yang optimal”.

Dengan demikian, akuntansi sangat diperlukan untuk mewujudkan responsibilitas pada organisasi sektor publik. Hal ini dikarenakan akuntansi sangatlah membantu organisasi sektor publik dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang untuk menjalankan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan. Sistem akuntansi yang memadai akan membantu organisasi sektor publik dalam melaporkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bukti penunjang bahwa organisasi sektor publik tersebut telah menggunakan dana APBD secara optimal.

Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas

Prinsip efisiensi dan efektivitas adalah suatu prinsip yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang tersedia, sumber daya yang sangat terbatas harus digunakan dengan sangat efisien dan efektif agar hasil yang didapat sesuai dengan rencana. Organisasi sektor publik dalam wilayah kota mendapatkan tugas dan wewenang yang diberi oleh walikota, tugas dan wewenang tersebut harus dilaksanakan dengan optimal dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dianggarkan.

Peran akuntansi dalam mewujudkan prinsip efisien dan efektivitas pada organisasi sektor publik sangatlah penting, karena akuntansi dapat membantu organisasi sektor publik dalam menentukan pemakaian dana APBD yang telah dianggarkan agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh walikota secara efisien dan efektif. Hal ini selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nasrin di bidang Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Sumatera Utara yaitu sebagai berikut:

“Akuntansi dalam mewujudkan prinsip efisiensi dan efektivitas menurut saya sangat berperan, karena dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan efisien akuntansi dapat membantu dengan menentukan rencana-rencana agar tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh walikota dapat berjalan dengan optimal. Akuntansi juga berperan penting dalam menjalankan tugas dan wewenang agar berjalan sesuai rencana dan tepat waktu. Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas dalam organisasi sektor publik sendiri sudah memenuhi karena selama ini implementasinya

menggunakan aplikasi dan ada tentang standart harga satuan. Sehingga dana APBD sudah jelas digunakan untuk apa saja”.

Dengan demikian, maka organisasi sektor publik sangat membutuhkan peranan akuntansi dalam mewujudkan prinsip efisiensi dan efektivitas karena dalam menentukan rencana-rencana kerja untuk menjalankan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh walikota secara efisien dan efektif. Rencana yang ditentukan oleh akuntansi sangat berperan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat terbatas, keterbatasan sumberdaya tersebut menjadikan organisasi sektor publik sangat membutuhkan peranan akuntansi dalam mengelolah dana APBD tersebut agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang secara optimal dan tepat waktu.

Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Visi yang Strategis

Visi yang strategis adalah prinsip yang berkaitan dengan rencana dalam menentukan program atau kegiatan yang strategis untuk masa yang akan datang dalam organisasi sektor publik. Hal ini berkaitan dengan penentuan rencana kerja suatu organisasi agar memperoleh hasil yang maksimal. Rencana kerja ditentukan untuk meningkatkan kinerja atau mempertahankan hasil kinerja dari tahun yang sebelumnya. Rencana kerja dilaksanakan dengan menggunakan dana dari pemerintah yaitu berupa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dianggarkan.

Peran akuntansi dalam mewujudkan prinsip visi yang strategis pada organisasi sektor publik sangat penting karena akuntansi memiliki peranan yaitu dengan menentukan rencana kerja yang strategis. Akuntansi dapat membantu organisasi sektor publik dalam menentukan rencana kerja yang akan disusun, dalam menentukan rencana kerja organisasi sektor publik dapat mempertimbangkan dana APBD yang akan digunakan agar rencana kerja yang telah disusun dapat terealisasi dengan baik dan optimal. Akuntansi dapat menggunakan metode *cost of effectiveness* (biaya yang efektif) dalam menentukan rencana kerja, yaitu dengan mengurangi biaya-biaya yang dapat diminimalisirkan agar dalam penggunaan dana APBD tersebut dapat efisien dan efektif. Hal ini selaras dengan dengan penjelasan Bapak Nasrin di bidang Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Sumatera Utara yaitu sebagai berikut:

“Akuntansi sangat berperan dalam pembuatan Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Sosial Sumatera Utara, karena dalam menetapkan rencana kerja yang dananya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) yang terbatas maka akuntansi disini berperan untuk dapat memperkirakan berapa dana yang sesuai agar rencana kerja tersebut dapat terlaksana dengan baik. Menurut saya akuntansi dapat mempertimbangkan biaya yang akan digunakan yaitu dengan metode cost of effectiveness agar biaya-biaya tersebut dapat diminimalkan. Tanpa adanya akuntansi dalam menentukan rencana kerja akan sangat sulit, karena kita tidak bisa memperkirakan dana yang akan dipakai untuk melaksanakan rencana kerja tersebut, tetapi tidak dipungkiri terkadang anggaran tersebut kurang dikarenakan masyarakat yang ada di lapangan masih lebih banyak lagi yang membutuhkan bantuan dengan berbagai macam faktor”.

Dengan demikian, maka akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan prinsip visi yang strategis dalam organisasi sektor publik. Akuntansi sangat berperan dalam penyusunan rencana kerja yang optimal dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut dengan tujuan mencapai target yang ditetapkan. Rencana kerja digunakan sebagai pedoman penyusunan anggaran yang akan diajukan oleh organisasi sektor publik kepada pemerintah untuk keberlangsungan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh organisasi sektor publik tersebut.

Hambatan Peran Akuntansi dalam Mewujudkan *Good Governance*

Peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* tidak luput dengan adanya hambatan yang muncul. Hambatan tersebut dapat mengganggu proses berlangsungnya akuntansi yang dapat berimbas pada kinerja yang dihasilkan, perlunya pengoptimalan dari berbagai sudut untuk mengatasi hambatan yang terjadi agar proses akuntansi berjalan dengan baik. Hal ini sependapat dengan pernyataan dari Syamsul selaku bagian keuangan pada Dinas Bapak Nasrin di bidang Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Sumatera Utara yaitu sebagai berikut:

“Hambatan yang terjadi biasanya tentang sumber daya manusia yang masih belum paham tentang akuntansi karena tidak semua yang bekerja disini adalah lulusan dari bidang akuntansi, tetapi masih bisa diatasi oleh pegawai-pegawai Dinsos. Hambatan yang terjadi biasanya hanya masalah jaringan internet karena disini hampir semua perkerjaannya membutuhkan jaringan internet. tetapi itu juga tidak menjadi masalah yang signifikan”.

Dengan demikian, maka peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* tidak begitu signifikan, hanya saja diperlukan perawatan atas jaringan internet dan sistem yang digunakan. Kerja sama antar bidang dalam mengatasi hambatan yang ada sangat diperlukan agar dalam proses mewujudkan *good governance* dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan kinerja yang optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas pada Dinas Sosial Sumatera Utara sangatlah penting, dan secara keseluruhan Dinas Sosial Sumatera Utara telah menerapkan prinsip *good governance* dalam organisasi sektor publik dengan melibatkan akuntansi didalamnya. Prinsip akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas, serta visi dan misi yang strategis pada Dinas Sosial Sumatera Utara dapat diwujudkan dengan adanya peran akuntansi, karena akuntansi sangat penting dan berkesinambungan dalam menyajikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporan kinerja sektor publik sesuai dengan prinsip laporan keuangan akrual basis berdasarkan peraturan yang berlaku.

Akuntansi juga berperan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dianggarkan. Dalam melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana APBD, maka laporan keuangan Dinas Sosial Sumatera Utara terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya laporan keuangan akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuktikan bahwa dana yang telah digunakan sektor publik tersebut telah menggunakan dana APBD secara ekonomis dan optimal. Dengan adanya akuntansi juga dapat membantu dalam penyusunan rencana kerja yang optimal dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan agar sesuai dengan target yang telah disusun.

DAFTAR REFERENSI

- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia.
- Hariadi, P., Restianto, Y., dan Bawono, I. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahsun, M., F. Sulistyowati, dan H. A. Purwanugraha. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Muchammad Romy Ashari, I. B. R. (2019). *Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya)* Ikhsan BudiRiharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Napisah, L. S. (2015). *Peran Akuntan Dalam Implementasi Good Corporate Governance (Gcg) Di Indonesia*. JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis.
- Susilawati, E. (2017). *Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance*. JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis.
- Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). *Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung*. JRAK Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis.
- Rustiarini, N. W., & Denpasar, U. M. (2016). *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa*. Simposium Nasional Akuntansi.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.